



Pemkot Diminta Jembatani UKM dengan Bank

UMBULHARJO -- Perbankan belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan pengembangan usaha kategori usaha kecil dan menengah. Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta diminta menjembatani UKM dengan perbankan.

Pemintaan tersebut disampaikan para pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) DIY saat beraudiensi dengan Wakil Walikota Yogyakarta, H Haryadi Suyuti di Balai kota Timoho, Selasa (9/12) sore.

Ketua BPD Hipmi DIY, H Setyo Wibowo mengemukakan, pernyataan perbankan tentang keberpihakan mereka terhadap UKM hanya retorika. Demikian pula dengan pernyataan potensi atau kemampuan membayar sebagai pertimbangan utama bank untuk mengucurkan kredit. Kenyataannya, bank tetap menjadikan jaminan aset sebagai syarat utama kredit.

Menurutnya, bank syariah pun tidak bisa diharapkan. Bank syariah setali tiga uang dengan bank konvensional dalam kebijakan kreditnya.

"Bank itu inginnya tetap independen, bukan mitra UKM. Bank yg bank, kalau mengatakan mitra itu hanya untuk *branding* yang mengesankan kalau bank itu baik hati. Bank mitra UKM itu bohong," ucapnya.

Untuk itu dia meminta Pemkot bisa menjadi jembatan antara pengusaha kecil dan menengah dengan bank. Sebab tidak semua pengusaha mewujudkan kekayaan usahanya dalam bentuk aset. Misalnya, pelaku industri kreatif sering menggunakan keuntungan usahanya untuk membeli alat, bukan aset, padahal bank menginginkan aset.

Senada, pengurus Hipmi DIY, Kusdiyono menanyakan kemungkinan Pemkot "mempengaruhi" perbankan untuk ke-

pentingan UKM. Misalnya dengan memberikan referensi kepada bank mengenai UKM yang akan meminjam ke bank. Hal tersebut diharapkan bisa dilakukan setidaknya kepada bank lokal seperti BPD. Dia menilai sampai saat ini BPD belum banyak berperan dalam pengembangan UKM.

"Kredit pemerintah seperti KUR yang Rp 5 juta itu terlalu kecil. Sementara kalau ke bank banyak ganjalannya. Inginnya kita ya misalnya jangan sampai pengembangan usaha gagal gara-gara jaminan. Kita dapat *buyer*, tapi gagal memenuhi, karena *nggak* bisa dapat modal dari bank akibat terbentur jaminan," tuturnya.

Haryadi sendiri menilai tidak pas apabila BPD hanya menjadi "kasir" pemerintah. Mestinya BPD bisa memperbesar portofolio kreditnya. BPD mestinya bisa menunjukkan kalau dirinya tuan rumah di DIY. (fir)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Mei 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005